

## STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DI KABUPATEN TANAH BUMBU DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN

Abdul Hadi, Asrid Juniar, Sufi Jikrillah

Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat  
Jalan Brigjen H. Hasan Basry Kayu Tangi Banjarmasin

**Abstract:** Bank Perkreditan Rakyat (BPR) is bank accepting deposit only in the form of time deposit, other form and or saving that likened with and channel fund as effort BPR. BPR aim to support execution of national development in order to improving generalization, economic growth and stability of national of up at improvement of publics prosperity. This research aim to know competent or improper founding Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) in Regency of Tanah Bumbu. For reach such target, using various statistical methods matching with the requirement and special for the simply financial aspect (without dicounted) and also with discounted (discounted cash flow). Result of conclusion obtained from this research that PDRB and PAD is big enough and to experience of growth, Potency of DPK is big enough that is bigger of Rp 451,6 M and non-stoped to experience of growth. Credit potency is big enough that is bigger of Rp 572,5 M and non-stoped to experience of growth. Plan of founding Bank Perkreditan Rakyat (BPR) in Kabupaten Tanah Bumbu confluence which is located in Transmigrasi street Kecamatan Simpang Empat Batulicin very competent to be recommended and get permission from Bank Indonesia.

**Keywords:** feasibility study, Bank Perkreditan Rakyat, financial aspect

### PENDAHULUAN

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. BPR bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sasaran BPR ialah untuk melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang kecil, pegawai dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan. Pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang (rentenir dan pengijon).

Bank Perkreditan Rakyat sebagai bank untuk daerah-daerah pedesaan atau pengusa-

ha gurem yang sifat usahanya melayani sektor informal di kota-kota kabupaten, kecamatan dan daerah pedesaan. Sesuai dengan kemampuan permodalan yang lemah dari masyarakat umumnya, bentuk Bank Perkreditan Rakyat merupakan bentuk yang tepat untuk didirikan di kabupaten, sekaligus sebagai lembaga keuangan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah.

Di Indonesia setelah melalui pembaharuan undang-undang perbankan yang cukup panjang, maka dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa: bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian tersebut mencerminkan dua peran bank sekaligus baik sebagai perantara keuangan (*financial intermediate*) maupun se-

bagai *institute of economic development* (Abdullah, 2003,17).

Bentuk bank menurut Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 ini terdiri atas:

- a. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Mengingat bahwa bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor: 10 tahun 1998: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Secara periodik bank-bank wajib menyampaikan laporan sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam rangka penilaian tingkat kesehatan dan kinerjanya. Bank-bank dituntut transparan dengan kewajiban untuk menyediakan informasi kepada pihak nasabah baik yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh nasabah ataupun informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank. Sehingga kinerja perbankan dapat diketahui oleh segala pihak yang berkepentingan dengan bank yang bersangkutan.

Banyak pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengetahui lebih mendalam tentang kondisi bank melalui laporan keuangan yang dibuat oleh suatu bank. Menurut Muljono (1995,9) karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sudah tentu mereka akan memberikan tekanan-tekanan analisis pendekatan-pendekatan maupun cara-cara analisis yang berbeda beda pula, sesuai dengan sifat dan kepentingan

masing-masing.

Kepentingan Masyarakat Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang dipercayakan masyarakat untuk menyimpan dananya secara aman dan terjamin akan kerahasiaannya. Oleh karena itu dalam rangka melindungi kepentingan para peminjam dan disuatu bank, maka pemerintah melalui Bank Indonesia mewajibkan setiap bank dan lembaga keuangan lainnya setiap 3 bulan sekali untuk mengumumkan neraca dan laporan perhitungan laba/ruginya di media cetak.

Pos-pos neraca dan rugi/laba yang harus diumumkan telah diatur secara seragam antara satu bank dengan bank lainnya. Hingga dengan demikian para pemilik dana tersebut akan dapat mengikuti perkembangan masing-masing banknya secara umum, khususnya tentang perkembangan likuiditasnya.

Apabila bank yang bersangkutan menunjukkan tanda-tanda mengalami kesulitan likuiditas maka yang bersangkutan akan dapat mengambil tindakan yang perlu. Selain itu bonafiditas dari bank-bank yang bersangkutan akan dapat diketahui dengan mudah sebagai nasabah dapat pula memilih bank yang tepat.

Dari laba/rugi yang diumumkan bila dihubungkan dengan pos-pos neraca, (pasiva dan aktiva) masyarakat umum juga akan mampu membuat perhitungan secara kasar tentang tingkat efisiensi bank yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Kepentingan Pemegang Saham/Pemilik. Sebagian besar bank-bank di Indonesia pada saat ini dimiliki oleh kelompok yang terbatas antara lain Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, dan sekelompok individu pengusaha dan masih banyak bank yang belum *go public*. Sehingga kepentingan para pemilik disini belum dapat diukur dengan jumlah dividen yang akan diterima dari saham-saham yang dimilikinya, tetapi penilaiannya bank terbatas apakah manajemen yang mengelola bank-bank tersebut telah sukses atau tidak. Jika dianggap tidak memuaskan maka ada kemungkinan manajemen yang ada akan segera di ganti dan sebaliknya, terutama berlaku untuk bank-bank milik Pemerintah/Pemerintah Daerah. Sudah tentu ukuran sukses tersebut akan ditinjau pula dengan 2 (dua) arah yaitu sebagai *agent of*

*development* dan dari sudut badan usaha yang mengejar keuntungan untuk mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan hidupnya. Sedangkan dari bank-bank yang sahamnya dimiliki oleh lembaga/individu/swasta tentu penilaiannya akan lebih di tekankan pada kemampuan manajemen dalam mengembangkan modalnya untuk memperoleh laba yang diharapkan, dan kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mendukung perkembangan kelompok-kelompok usahanya, serta pencapaian tujuan-tujuan tertentu yang telah digariskan oleh pimpinan dari kelompok (*holding company*) yang bersangkutan.

Kepentingan pajak. Dengan mempelajari laporan-laporan keuangan yang telah diumumkan tersebut pihak pajak akan dapat lebih mudah menjalankan tugasnya dalam menetapkan besarnya pajak perseroan bagi bank yang bersangkutan, karena laba tersebut terlihat jelas dalam laporan laba/rugi dari bank yang bersangkutan. Dengan cara yang ada pada saat ini, jelas pihak pajak akan banyak memperoleh kemudahan dalam mendapatkan wajib pajaknya karena yang bersangkutan secara terbuka telah mengumumkan laporan keuangannya.

Selain itu untuk mengukur kewajaran laba/rugi yang diumumkan tersebut pihak pajak juga akan dapat membandingkan dengan bank-bank lain yang sejenis.

Kepentingan Pemerintah. Pemerintah menganggap bank sebagai kesatuan usaha yang vital dengan tugas untuk membantu mengatur kegiatan perekonomian negara pada umumnya dan kegiatan moneter pada khususnya. Bank-bank terutama Bank Pemerintah merupakan alat untuk melaksanakan mekanisme kebijaksanaan (*policy*) pemerintah dibidang moneter. Mengingat kedudukannya yang sangat strategis tersebut tidaklah mengherankan apabila Bank Indonesia merasa perlu mengadakan pengawasan dan pembinaan yang intensif terhadap bank-bank pemerintah maupun bank-bank swasta.

Bahkan kalau perlu akan ikut campur tangan langsung apabila ada suatu bank swasta yang mengalami berbagai kesulitan yang serius, dan sudah tentu hal ini pula cukup melegakan para penyimpan dananya.

Kepentingan pemerintah yang lain adalah sumbangannya terhadap pembagian laba bank-bank pemerintah yang mempunyai porsi cukup besar pula. Sedangkan yang di luar kepentingan finansial seperti terbukanya kesempatan kerja, pengembangan sektor-sektor perekonomian, maupun untuk memenuhi tugas-tugas makro ekonomis lainnya.

Karyawan. Para karyawan tentu akan sangat berkepentingan untuk mengetahui posisi dan kondisi keuangan dimana ia bekerja, karena para karyawan mengharapkan sawah dan ladangnya dapat berkembang secara subur hingga mampu untuk menjamin hidupnya sampai masa hari tuanya. Disamping itu dengan mengetahui perkembangan keuangannya para karyawan juga berkepentingan terhadap penghasilan yang diterimanya, maupun pembagian laba/bonus yang akan diterimanya tiap akhir tahun apakah sudah sepadan dengan pengorbanan yang diberikan kepada bank dimana bekerja.

Manajemen Bank. Dalam mengelola bank maka para pejabat bank perlu mengatur sebaik-baiknya posisi likuiditasnya, mengatur semaksimal mungkin pemanfaatan *earning assets* bank yang bersangkutan serta mengatur apakah permodalan yang diperlukan telah memadai atau tidak.

Untuk kepentingan tersebut maka besarnya *bank assets*, *bank liabilities* serta harus dapat diatur dalam perbandingan yang optimal sehingga dapat dicapai tingkat profitabilitas yang memadai.

Cara yang paling baik untuk mencapai tujuan tersebut yaitu melalui analisis laporan keuangannya guna mendapatkan rasio-rasio hubungan *assets*, *liabilities*, *capital* dan *profit* yang akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat. Sudah tentu untuk dapat melengkapi kesimpulan-kesimpulannya dengan lebih seksama maka para pejabat bank akan memerlukan pula berbagai indikator keuangan informasi-informasi lain yang diperlukan secara timbal balik dalam merumuskan kesimpulan-kesimpulan/keputusan-keputusannya.

Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. Kinerja (*performance*) bank secara keselu-

ruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia (Abdullah, 2003,108).

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas bank. Penilaian aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana merupakan kinerja keuangan yang berkaitan dengan peran bank sebagai lembaga intermediasi. Sedangkan penilaian kondisi likuiditas bank guna mengetahui seberapa besar kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada para deposan. Penilaian aspek profitabilitas guna mengetahui kemampuan menciptakan profit, yang sudah barang tentu penting bagi para pemilik. Dengan kinerja bank yang baik pada akhirnya akan berdampak baik pada internal maupun bagi pihak eksternal bank.

#### METODE PENELITIAN

Sumber data dalam bentuk data sekunder. Data sekunder diperoleh dari instansi-instansi pemerintah, data tersebut antara lain (1) Berbagai publikasi yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik atau Statistik Daerah, seperti: indikator ekonomi, *statistical year book of Indonesia*, dan berbagai daerah dalam angka; (2) Publikasi yang dikeluarkan oleh BPKMD, seperti daftar skala prioritas; (3) Publikasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, kajian ekonomi regional dari Cabang Bank Indonesia Banjarmasin; dan, (4) Publikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi BPR, juga informasi perbankan dan industri dari sumber lainnya. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, digunakan berbagai metode statistik yang sesuai dengan kebutuhan dan khusus untuk aspek keuangan dilakukan secara sederhana (tanpa diskonto) serta dengan diskonto (*discounted cash flow*).

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi seperti angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi, inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Nilai PDRB Kabupaten Tanah Bumbu menurut harga berlaku pada tahun 2005 sebesar Rp2.608.005.189,00. Nilai ini meningkat terus dari tahun 2003 yang mencapai Rp2.068.714.525,00. Pertumbuhan menunjukkan kondisi meningkat dan kembali menurun di tahun 2005 dari 10,63% tahun 2003, 13,72% tahun 2004, turun menjadi 10,86% tahun 2005 (Tabel 1).

Jika dilihat dari PDRB dengan harga konstan 2000, nilai PDRB tahun 2005 sebesar Rp1.852.579.877,00 telah tumbuh 6,08% dari tahun 2004 yang mencapai Rp1.746.458.830,00. Dari nilai PDRB sektoral penyumbang terbesar adalah sektor pertambangan dan penggalian, kemudian sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor bangunan, jasa-jasa, bank dan lembaga keuangan serta terakhir sektor listrik, gas, dan air.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Tanah Bumbu bersumber dari statistik Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan dialokasikan dari Kabupaten Kotabaru (sebab data tersebut untuk Kabupa-ten Kotabaru dan Tanah Bumbu masih jadi satu) dengan menggunakan rasio PDRB sub sektor bank pada masing-masing Kabupaten.

Tabel 1. PDRB Kabupaten Tanah Bumbu menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2003 s.d. 2005 (Ribuan Rupiah)

| No. | Lapangan Usaha                       | 2003          | %     | 2004*)        | %     | 2005**)       | %     |
|-----|--------------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| 1.  | Pertanian / Agriculture              | 441.175.774   | 21,33 | 496.843.370   | 21,12 | 539.233.476   | 20,68 |
| 2.  | Pertambangan dan Penggalian          | 741.911.428   | 35,86 | 880.690.841   | 37,44 | 965.591.826   | 37,02 |
| 3.  | Industri Pengolahan                  | 245.605.976   | 11,87 | 257.021.053   | 10,93 | 268.436.130   | 10,29 |
| 4.  | Listrik, Gas dan Air Minum           | 7.689.841     | 0,37  | 8.583.894     | 0,36  | 9.477.947     | 0,36  |
| 5.  | Bangunan                             | 120.657.170   | 5,83  | 136.960.647   | 5,82  | 157.111.704   | 6,02  |
| 6.  | Perdagangan, Restoran dan Perhotelan | 202.800.937   | 9,80  | 232.355.137   | 9,88  | 259.487.837   | 9,95  |
| 7.  | Pengangkutan dan Komunikasi          | 207.941.376   | 10,05 | 219.765.385   | 9,34  | 259.459.255   | 9,95  |
| 8.  | Bank dan Lembaga Keuangan            | 27.977.934    | 1,35  | 36.921.824    | 1,57  | 40.266.034    | 1,54  |
| 9.  | Jasa-jasa                            | 72.954.089    | 3,53  | 83.313.031    | 3,54  | 108.940.980   | 4,18  |
|     | Jumlah                               | 2.068.714.525 | 100   | 2.352.455.182 | 100   | 2.608.005.189 | 100   |
|     | Pertumbuhan                          | 10.63         |       | 13.72         |       | 10.86         |       |

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Bumbu dalam Angka Tahun 2006

\*) angka diperbaiki

\*\*\*) angka Sementara

Tabel 2. PDRB Kabupaten Tanah Bumbu menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2003 s.d. 2005 (Ribuan Rupiah)

| No. | Lapangan Usaha                       | 2003          | %      | 2004*)        | %      | 2005**)       | %      |
|-----|--------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1.  | Pertanian/Agriculture                | 359.935.677   | 22,01  | 397.286.953   | 22,75  | 423.393.065   | 22,85  |
| 2.  | Pertambangan dan Penggalian          | 557.828.141   | 34,12  | 589.851.923   | 33,77  | 631.105.769   | 34,07  |
| 3.  | Industri Pengolahan                  | 198.021.427   | 12,11  | 200.750.647   | 11,49  | 201.786.161   | 10,89  |
| 4.  | Listrik dan Air Minum                | 6.247.897     | 0,38   | 6.607.592     | 0,38   | 7.015.852     | 0,38   |
| 5.  | Bangunan                             | 95.261.150    | 5,83   | 103.662.180   | 5,94   | 109.269.480   | 5,90   |
| 6.  | Perdagangan, Restoran dan Perhotelan | 168.898.374   | 10,33  | 180.241.835   | 10,32  | 189.315.125   | 10,22  |
| 7.  | Pengangkutan dan Komunikasi          | 167.036.608   | 10,22  | 175.392.088   | 10,04  | 192.539.520   | 10,39  |
| 8.  | Bank dan Lembaga Keuangan            | 23.455.887    | 1,43   | 29.507.263    | 1,69   | 27.863.958    | 1,50   |
| 9.  | Jasa-jasa                            | 58.429.318    | 3,57   | 63.158.349    | 3,62   | 70.290.947    | 3,79   |
|     | Jumlah                               | 1.635.114.479 | 100,00 | 1.746.458.830 | 100,00 | 1.852.579.877 | 100,00 |
|     | Pertumbuhan                          | 6.06          |        | 6.81          |        | 6.08          |        |

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Bumbu dalam Angka Tahun 005

\*) angka diperbaiki

\*\*\*) angka sementara

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasilnya pada tabel 3 dimana DPK pada tahun 2004 sebesar Rp291.543.000.000,00 kemudian pada tahun 2007 (sampai Mei) naik

menjadi Rp451.654.000.000,00. Maka DPK ini selama 3 (tiga) tahun mengalami kenaikan sebesar 54,52% atau rata-rata per tahunnya sebesar 18,31% (tabel 3).

Tabel 3. Posisi Dana Simpanan Rupiah Bank Umum Kabupaten Tanah Bumbu Menurut Jenis Simpanan Tahun 2004 s.d. 2007 (dalam Jutaan Rupiah)

| Jenis Simpanan |              | 2004     | 2005     | 2006     | 2007    |
|----------------|--------------|----------|----------|----------|---------|
|                |              | Desember | Desember | Desember | Agustus |
| A              | Rupiah       | 291.543  | 341.923  | 418.026  | 451.654 |
|                | 1. Giro      |          |          |          |         |
|                | - nominal    | 52.731   | 82.934   | 124.313  | 165.675 |
|                | - rekening   | 871      | 599      | 799      | 826     |
|                | 2. Simpanan  |          |          |          |         |
|                | - nominal    | 41.469   | 56.925   | 68.059   | 69.913  |
|                | Berjangka    |          |          |          |         |
|                | - bilyet     | 522      | 541      | 567      | 582     |
|                | 3. Tabungan  |          |          |          |         |
|                | - nominal    | 197.343  | 202.064  | 225.654  | 216.066 |
|                | - rekening   | 53.138   | 57.797   | 53.954   | 52.163  |
| B              | Valuta Asing |          |          |          |         |
|                | 1. Giro      |          |          |          |         |
|                | - nominal    |          |          |          |         |
|                | - rekening   |          |          |          |         |
|                | 2. Simpanan  |          |          |          |         |
|                | - nominal    |          |          |          |         |
|                | Berjangka    |          |          |          |         |
|                | - bilyet     |          |          |          |         |
|                | 3. Tabungan  |          |          |          |         |
|                | - nominal    |          |          |          |         |
|                | - rekening   |          |          |          |         |

Sumber: Statistik Ekonomi-Kuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Juni 2007

Tabel 4. Posisi Kredit Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum Menurut Jenis Penggunaan dan Sektor Ekonomi di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 s.d. 2007 (dalam Jutaan Rupiah)

| Jenis Penggunaan dan Sektor Ekonomi |   | 2004     | 2005     | 2006     | 2007    |
|-------------------------------------|---|----------|----------|----------|---------|
|                                     |   | Desember | Desember | Desember | Agustus |
| A                                   | Jenis Penggunaan                            | 502.935  | 586.081  | 566.348  | 572.546 |
|                                     | 1. Modal Kerja                              |          | 230.204  | 202.073  | 130.975 |
|                                     | 2. Investasi                                |          | 309.902  | 315.233  | 375.546 |
|                                     | 3. Konsumsi                                 |          | 45.975   | 49.043   | 66.025  |
| B                                   | Menurut Jenis Valuta                        | 502.935  | 586.081  | 566.348  | 572.546 |
|                                     | 1. Rupiah                                   |          | 395.624  | 416.417  | 429.784 |
|                                     | 2. Valas                                    |          | 190.457  | 149.931  | 142.762 |
| C                                   | Sektor Ekonomi                              | 502.935  | 586.081  | 566.348  | 572.546 |
|                                     | 1. Pertanian                                | 278.584  | 304.223  | 241.979  | 229.751 |
|                                     | 2. Pertambangan                             | 134.838  | 154.729  | 145.605  | 141.205 |
|                                     | 3. Perindustrian                            | 1.776    | 2.879    | 21.362   | 20.855  |
|                                     | 4. Listrik, Gas dan Air Minum               | 0        | 0        | 0        | 0       |
|                                     | 5. Konstruksi                               | 10.349   | 12.190   | 12.313   | 9.631   |
|                                     | 6. Perdagangan, Restoran dan Hotel          | 38.894   | 51.509   | 73.893   | 80.614  |
|                                     | 7. Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi | 1.978    | 3.936    | 8.462    | 9.182   |
|                                     | 8. Jasa-jasa Dunia Usaha                    | 2.713    | 10.384   | 13.304   | 10.426  |
|                                     | 9. Jasa-jasa Sosial Kemasyarakatan          | 131      | 255      | 387      | 4.859   |
|                                     | 10. Lain-lain                               | 33.672   | 45.975   | 49.043   | 66.025  |

Sumber: Statistik Ekonomi-Kuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Juni 2007

Tabel 5. PD BPR Kabupaten Tanah Bumbu Perhitungan Proyeksi Rasio Keuangan Analisis Rasio

|  | Tahun 1       | Tahun 2       | Tahun 3       | Tahun 4       | Tahun 5       |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Non Performing Loan (NPL)                | 0,50%         | 1,50%         | 1,50%         | 1,50%         | 1,50%         |
| Ratio Permodalan:                        |               |               |               |               |               |
| a. Capital Adequacy Ratio (CAR)          |               |               |               |               |               |
| (Equity Capital/Total Loan + Securities) | 0,97805       | 0,74176       | 0,57752       | 0,47231       | 0,40798       |
| Rasio Rentabilitas:                      |               |               |               |               |               |
| a. Rasio Biaya Operasional               |               |               |               |               |               |
| Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)   | 103,77%       | 96,56%        | 89,30%        | 80,41%        | 74,38%        |
| b. Return on Assets (ROA)                | 3,45%         | 4,99%         | 6,80%         | 9,48%         | 12,26%        |
| Profit Sensitivity Analysis (PSA):       |               |               |               |               |               |
| a. Return on Total Assets (RTA)          | 0,034481      | 0,049885      | 0,068046      | 0,094760      | 0,122611      |
| Earning before interest and taxes        |               |               |               |               |               |
| Earning (laba setelah pajak)             | -9,945,062    | 12,815,877    | 53,134,214    | 137,683,890   | 270,912,673   |
| Taxes (pajak)                            | 0             | 1,281,588     | 5,470,132     | 23,805,167    | 63,773,802    |
| Interest (biaya bunga dan provisi)       | 78,988,056    | 103,225,716   | 136,422,685   | 182,089,109   | 245,131,838   |
| EBIT                                     | 69,042,994    | 117,323,181   | 195,027,031   | 343,578,166   | 579,818,313   |
| Total Assets                             | 2,002,328,020 | 2,351,884,617 | 2,866,091,237 | 3,625,771,952 | 4,728,940,293 |
| b. Leverage Management                   | 1.022441      | 1.348153      | 1.731553      | 2.117249      | 2.451099      |
| c. Cost of Debt                          | 0.078030      | 0.076447      | 0.075088      | 0.073941      | 0.072985      |
| d. Spread Management                     | -0.043549     | -0.026562     | -0.007042     | 0.020819      | 0.049626      |
| e. Debt Management                       | -0.003398     | -0.002031     | -0.000529     | 0.001539      | 0.003622      |
| f. Return on Equity                      | 0.069737      | 0.117137      | 0.185872      | 0.295391      | 0.423141      |

Sumber: data diolah (2007)

### Pembahasan

Ada beberapa asumsi yang digunakan dalam perhitungan kelayakan investasi, yaitu: (a) Penghimpunan Dana Pihak Ketiga 1 tahun ke depan adalah sebesar Rp789.316.665,00; (b) Penggunaan dana dari dana yang terhimpun, diproyeksikan untuk kredit sebesar Rp780.328.126,00,00; dan, (c) *Cost of capital* adalah sebesar 14%.

Adapun perkiraan dana pihak ke tiga yang dapat dihimpun oleh PD BPR Tanah Bumbu dilihat dari *market space* yang masih ada dengan asumsi 0,5% dari Rp157.863.333.044,00 = Rp 789.316.665,00 dan diasumsikan dana masyarakat yang dapat

dihimpun pada bulan pertama sebesar Rp15.786.333,00.

Perhitungan proyeksi rasio keuangan seperti *Non Performing Loans* (NPL) merupakan indikator pengukuran kinerja bank dalam berusaha mengoptimalkan aktiva yang dimiliki untuk memperoleh laba. NPL adalah perbandingan kredit yang diberikan bermasalah dengan total kredit. NPL untuk PD BPR Tanah Bumbu pada tahun pertama sebesar 0,50% dan tahun kelima sebesar 1,5%. Kemudian rasio permodalan atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk tahun pertama sebesar 0,97805 dan tahun kelima sebesar 0,40898. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada tahun pertama sebesar

103,77% dan tahun kelima sebesar 74,38%, *Return on Assets* (ROA) tahun pertama sebesar 3,45% dan pada tahun kelima sebesar 12,26%, rasio-rasio keuangan ini dapat dilihat pada tabel 5.

Laba bersih setelah pajak pada tahun pertama operasi masih negatif, yaitu sebesar Rp9.945.062,00,00 dan hingga akhir tahun kelima mencapai Rp207.138.871,00. Posisi kas akhir pada tahun pertama operasi sebesar Rp227.221.455,00 dan pada akhir tahun kelima sebesar Rp428.221.455,00. *Net present value* (NPV) dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto 14%. Hasil perhitungan menunjukkan NPV sebesar Rp50.682.671,00. NPV yang positif menunjukkan bahwa rencana pendirian PD BPR Kabupaten Tanah Bumbu tersebut memberikan nilai tambah bagi pemilikinya sehingga layak untuk dilaksanakan. *Internal rate of return* (IRR) adalah *discount rate* yang menghasilkan NPV sama dengan nol. Pada tabel 5 tampak bahwa IRR adalah 18,83%. Sedangkan biaya modal (WACC) hanya 14%. Berarti usaha ini memberikan tingkat pengembalian yang cukup tinggi dibandingkan terhadap biaya modalnya. Berdasarkan kriteria tersebut, rencana pendirian PD BPR ini layak untuk dilaksanakan. Rencana investasi pendirian PD BPR ini menghasilkan nilai B/C Ratio sebesar 1,11 B/C Ratio lebih besar dari satu berarti rencana investasi yang diusulkan layak untuk dilaksanakan. Jangka waktu pengembalian investasi yang diperhitungkan terhadap nilai sekarang arus kas bersih usaha adalah 3,10 tahun atau 3 tahun 1,20 bulan. jika investor memandang bahwa jangka waktu pengembalian investasi tersebut cukup pendek, maka rencana pendirian PD BPR ini layak untuk dilaksanakan.

## PENUTUP

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) cukup besar dan terus mengalami peningkatan. Keadaan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang dapat dilihat dari makin meningkatnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan per kapita.

Posisi DPK Bank Umum Kabupaten Kotabaru mencapai Rp 451,6 milyar dan posisi kredit sebesar Rp572,5 milyar cukup potensial jika BPR didirikan di daerah ini. Direkomendasikan rencana pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Tanah Bumbu yang terletak di Jalan Transmigrasi Kecamatan Simpang Empat Batulicin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah M.F., 2003. *Manajemen Perbankan (Teknik Analisis Kinerja Keuangan Perbankan)*. Penerbit Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Asrid Juniar dkk., 2005. *Analisis Kinerja Finansial Bank Umum Swasta di Indonesia*. Jurnal Informasi Teknik dan Niaga. Politeknik Negeri Banjarmasin Tahun V, No.2. November. 2005.
- Asrid Juniar dkk., 2007. *Analisis Struktur Pasar Dan Kinerja Industri Perbankan di Propinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi. Vol. 6, No. 1: April. 2007.
- Asrid Juniar. 2007. *Pengaruh Struktur Pasar terhadap Kinerja Industri Perbankan Di Propinsi Kalimantan Selatan*. Hasil Penelitian Mandiri Tidak dipublikasikan.
- Bank Indonesia, 2003. *Direktori Perbankan Indonesia 2003*, Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Jakarta.
- Info Bank. 2003. *Sembilan Rasio Keuangan yang Menentukan Kinerja*. Info Bank. Nomor: 289 Volume XXV, Juni 17-21.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono, 2002. *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, Edisi Pertama, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Laba A.R., dkk., 2003. *Bank Syariah, Potensi Preferensi dan Perilaku Masyarakat di Wilayah Sulawesi Selatan*. Hasil Penelitian tidak dipublikasikan, kerjasama BI Makassar dengan LPM Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Mohd Khairuddin Hashim, *et al.*, 2001. *Testing Environment as The Moderator between Business Strategy-Performance Relationship: A Study of Malaysia*



- SME's. Journal of Small Business Management.*
- Muljono, T.P., 1995. *Analisa Laporan Keuangan untuk Perbankan.* Cetakan Kelima, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Santoso T.B. dkk., 2000. *Peran Perbankan Sulawesi Tenggara dengan Diberlakukannya Otonomi Daerah.* Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Volume 3 No. 2.
- Suhartono, 2002. *Pengaruh Kompetisi Bidang Fungsional terhadap Strategi Bisnis dan Kinerja Perbankan di Indonesia.* Disertasi tidak diterbitkan. Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
- Tim Peneliti FE Unlam, 2008. *Pemetaan Profil BPR di Wilayah KBI Banjarmasin.* Kerjasama Tim Peneliti FE Unlam dengan Bank Indonesia.
- Vazquez, R. L. Alvarez dan Santos M. L., 2002. *Market Orientation and Social Services in Private Non-Profit Organizations.* European Journal of Marketing, pp. 1022-1046.